

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau secara global di kenal sebagai *Institution of Islamic Finance*, mencakup lembaga bank dan non-bank. Berdasarkan penilaian *Global Islamic Finance Report (GIFR) 2013* (www.jawapos.com), Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan potensi pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia.

Industri perbankan syariah di Indonesia baru tampak pertumbuhannya setelah muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum, yang secara tegas mendefinisikan bank di Indonesia mencakup Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dapat beroperasi baik secara konvensional maupun syariah, sehingga memberikan kesempatan peluang bagi bank syariah untuk berkembang. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Saat ini banyak bank konvensional yang berbasis syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah, Mega Syariah dan lain sebagainya.

Sejauh ini perkembangan industri perbankan syariah terus tumbuh dengan laju bervariasi sesuai kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Keuangan syariah bisa menjadi salah satu solusi dunia dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Prinsip-prinsip khas keuangan syariah yang memihak pada pemerataan pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan, menjadikan pengembangan sistem keuangan syariah menjadi sangat relevan dengan pencapaian target SDGs. (www.ojk.go.id,24/10/16).

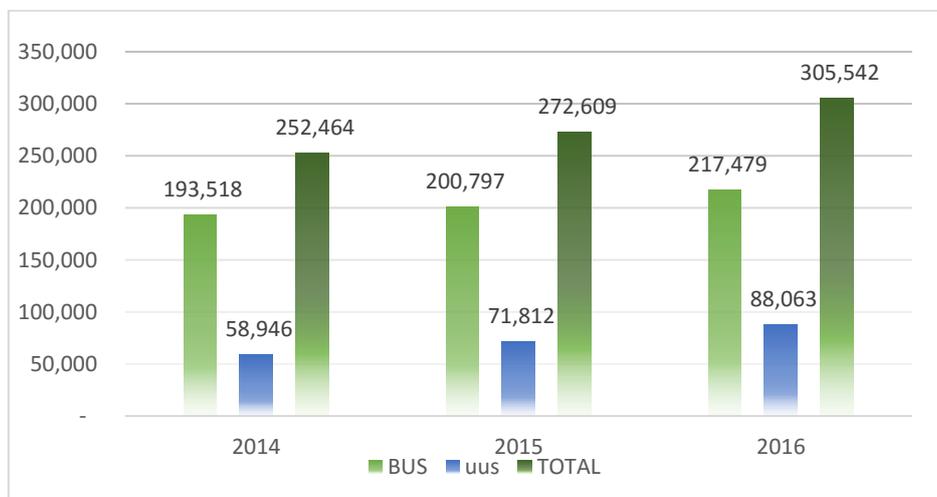
Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih tertumpu pada sector riil dan berdampak lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan, bahwa market share perbankan syariah terhadap industry perbankan nasional mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 4.60% per Juli tahun 2015, menjadi 4,81% per Juli 2016, meningkatnya pertumbuhan market share perbankan syariah secara nasional yang cukup tinggi, tidak lepas dari perkembangan bank syariah di setiap daerah. Sejalan dengan perkembangan market share bank syariah, asset perbankan syariah BUS dan UUS terjadi kenaikan, yaitu 18,49% (yoy) dari Rp 272,6 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 305.542 triliun (Juli 2016) kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya

penghimpunan dana pihak ketiga yaitu 12,54% (yoy) dari Rp 216 triliun (Juli 2015) menjadi Rp 243.184 triliun (Juli 2016), selanjutnya mendorong pembiayaan tumbuh sebesar 7,47% (yoy) dari Rp. 204.8 triliun (Juli 2015) menjadi 220.143 triliun (Juli 2016), dari sisi kualitas pembiayaan, NPF gross mengalami penurunan dengan (yoy) dari 4,89% (Juli 2015) menjadi 4,81% (Juli 2016). Sementara profitabilitas yang tercermin dari rasio ROA meningkat 0,91%(Juli 2015) menjadi 1,06% (Juli 2016) sedangkan rasio BOPO membaik dari 94,19% (Juli 2015) menjadi 92, 78% (Juli 2016), dan terjadi peningkatan kecukupan modal perbankan syariah dari kenaikan CAR, yaitu 14,47% (Juli 2015) menjadi 14,86% (Juli 2016). Dengan jumlah industri Bank umum syariah yang tercatat 12 Bank, usaha unit syariah sebanyak 22 Bank dan BPRS sebanyakm 165 Bank dan jaringan kantor sebanyak 2.562 (SPS/ojk/juli/2016, 15-18).

Tabel 1. 1

Perkembangan Aset Perbankan syariah



Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan 2016

Sebagai negara mayoritas Muslim, sudah selangkah Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan mimpi yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar, (milad ke-8, ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI), 2012), diantaranya:

1. jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah;
2. Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6.0%-6.5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.
3. Peningkatan *sovereign credit* rating Indonesia menjadi investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah.
4. Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar seharusnya mampu mewujudkan keuangan syariah yang lebih baik, akan tetapi kepercayaan masyarakat belum menunjukkan persepsi atau pemahaman yang baik terhadap bank syariah, kehadiran bank syariah ternyata belum mampu mengalihkan secara signifikan persepsi masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya

pemahaman atau persepsi masyarakat dalam pengembangan perbankan syariah (Subarjo, dalam Antoni, 2011), yaitu:

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional perbankan syariah.
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit atau belum teritergritas.

Dalam perkembangan bank syariah mengalami berbagai kendala dan tantangan. Tantangan tersebut yaitu tantangan jangka pendek ataupun panjang yang harus diselesaikan agar perkembangan perbankan dan keuangan syariah dapat mencapai target. Tantangan jangka pendek yang harus diselesaikan yaitu menyediakan sumber daya insani (SDI), secara kualitas maupun kuantitas, inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat, dan edukasi, sedangkan tantangan jangka panjang yaitu perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan masalah keuangan secara komprehensif. (Junaidi, 2015).

Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh perkembangan perbankan syariah, kendala yang dihadapi berkaitan dengan suatu sistem yang bersifat operasional yaitu diantaranya:

1. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah membuat perbankan syariah kesulitan untuk mengetahui legal perbankan.
2. Perbankan syariah kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam ke pasar keuangan lantaran modal masih minim.
3. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya masih menggunakan dana mahal (deposito syariah)
4. produk yang tidak variatif dan pelayanan ke publik yang belum memadai
5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berintergritas menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan minimnya pemahamana masyarakat.
6. Penyaluran dan pengawasan yang masih minim dan memperkuat arah kebijakan. (www.ojk.go.id).

Untuk mewujudkan keuangan syariah yang lebih baik, maka perlu adanya kerjasama dengan masyarakat. Berdasarkan badan pusat statistik jawa tengah tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia yaitu mencapai 237.641.326 juta jiwa. Seperti di daerah Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kotamadya jumlah penduduk mencapai 32.382.657 juta jiwa. Salah satunya yaitu kabupaten Banyumas dengan ibukota Purwokerto yang terdiri dari 27 kecamatan, dengan jumlah penduduk mencapai 1.635.909 jiwa (BPS, 2015, 27/10/16), dan mayoritas masyarakat purwokerto beragama Islam. Namun faktanya tidak semua masyarakat menggunakan produk atau jasa dari perbankan syariah. Seperti yang terjadi

di Kecamatan Karanglewas dan Cilongok merupakan kecamatan yang ada di kabupaten Purwokerto dengan laju pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi yaitu kecamatan Karanglewas yaitu sebesar 1,61% dan kecamatan Cilongok sebesar 1,15% (BPS,2015) dan Mayoritas masyarakat di kedua kecamatan tersebut beragama islam. Tetapi belum sepenuhnya masyarakat tersebut menggunakan produk atau jasa perbankan syariah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan perbankan syariah di wilayah Purwokerto menunjukkan tren positif. Purwokerto sebagai Kota eks karesidenan Banyumas dan menjadi pusat perekonomian di wilayah eks Karsidenan Banyumas. Menurut data per juli 2016 total aset gross, pembiayaan dan dana pihak ketiga, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) kota Purwokerto masing-masing sebanyak Rp. 1.064 triliun, 890 meliar, dan 871 miliar. Di lihat dari perkembangan perbankan syariah yang cukup tinggi, ini berarti memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk atau jasa perbankan syariah, sehingga perlu adanya promosi kepada masyarakat yang tidak hanya menggunakan sistem website, brosur maupun pamflet. Sosialisasi langsung juga perlu dilakukan agar calon nasabah benar-benar paham bagaimana sistem perbankan syariah, produk apa saja yang ditawarkan, bagaimana pelayanannya, dan dimana saja mereka dapat menemukan kantor bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu, hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelaah, diteliti dan dicermati faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan pembiayaan di bank syariah. Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi, maka peneliti mefokuskan pada variable religuitas, promosi, lokasi dan persepsi terhadap bank syariah di purwokerto. Dengan studi kasus para pedagang Muslim di pasar, menurut data perkembangan Bank umum dan BPR perbankan di wilayah eks karesidenan, total asset perkembangan Bank Umum dan BPR 2014 di sektor ekonomi khususnya perdagangan cukup tinggi yaitu periode Desember mencapai 5.400,19 miliar (BPS,2014). Hal ini lah yang menjadi alasan, mengapa peneliti menggunakan pedagang pasar, selain itu, para pedagang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penelitian ini mengambil judul tentang “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT MUSLIM TIDAK MELAKUKAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH (studi kasus pedagang muslim di pasar kota purwokerto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor religuitas mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah?

2. Apakah faktor persepsi mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah?
3. Apakah faktor lokasi mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah?
4. Apakah faktor promosi mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah faktor religuitas mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah.
2. Untuk mengetahui apakah faktor persepsi mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah.
3. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah.
4. Untuk mengetahui apakah faktor promosi mempengaruhi keputusan masyarakat Muslim tidak melakukan pembiayaan di bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Sebagai informasi tentang kekuatan dan kelemahan bank syariah dilihat dari sudut pandang nasabahnya. Informasi tersebut dapat mempunyai makna strategis untuk meningkatkan kinerja bank syariah.
3. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.